

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat berkembang pesat tidak hanya di kalangan perusahaan saja, namun teknologi informasi ini juga berkembang pesat di kalangan pemerintahan. Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintahan adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari pengembangan SPBE itu sendiri adalah untuk dapat membuat jaringan informasi terhadap layanan publik, membentuk hubungan yang interaktif untuk membentuk sistem manajemen yang bersifat efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Supriyanto et al., 2021).

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, pemerintah memerlukan percepatan pemanfaatan teknologi digital. Untuk mendukung percepatan teknologi digital, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memiliki Domain Arsitektur yang terdiri dari domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur layanan SPBE.

Semua domain yang ada di SPBE mengacu pada PermenPan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. salah satu komponen utama yaitu Arsitektur SPBE untuk mengintegrasikan semua domain yang ada (Republik Indonesia, 2020). Ketercapaian SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah berada pada nilai 2,37 (cukup) dan ada beberapa domain yang menjadi faktor SPBE yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE dan domain layanan SPBE. Untuk target indeks SPBE pada Kabupaten Lombok Tengah ada di angka 2,6 (Baik) (PermenpanRB, 2021) Berikut Tabel I-1 merupakan penjelasan dari Indeks SPBE pada Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I- 1 Indeks SPBE – Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	2,37 (Cukup)
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek	
Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,37
Domain Kebijakan SPBE	1,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggaraan SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

Berdasarkan Tabel I-1 di atas, bahwasannya masih ada beberapa isu internal di Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain (Al-Jauhari, 2021):

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur masih belum memadai.
2. Sarana dan prasana pelayanan yang kurang memadai, seperti:
3. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak semua data kependudukan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

5. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang berwenang karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak.

Untuk meningkatkan program pencatatan sipil terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kepemilikan dokumen akta kelahiran.
2. Pelayanan *online* adminduk.
3. Pelayanan jemput bola.

Melihat isu di atas, bahwasannya untuk meningkatkan program pencatatan sipil yang ada pada Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu proses pencatatan sipil, harus dilihat juga domain layanan SPBE yang didalamnya terdapat aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk menangani layanan administrasi kependudukan salah satunya proses pencatatan sipil yang memiliki pelayanan mulai dari pembuatan akta kelahiran, pencatatan perkawinan dan perceraian, hingga perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Melihat permasalahan yang ada pada dinas sini untuk meningkatkan pelayanan yang ada pada Disdukcapil, dinas ini memerlukan beberapa inovasi terkait beberapa proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan permasalahan di atas yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan misi ketiga yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih” diperlukan adanya perancangan Arsitektur *Enterprise* terkait dengan program pencatatan sipil yang mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk perancangan arsitektur dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggunakan *framework* TOGAF 9.2 pada sistem informasi pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

I.2 Perumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah dianalisis di atas, sudah ditemukan beberapa masalah yang ada. Harapan yang akan dicapai pada permasalahan kali ini yaitu:

1. Bagaimana analisis kebutuhan program pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Tengah dengan *framework* TOGAF 9.2?
2. Bagaimana perancangan *Blueprint Enterprise* Arsitektur menggunakan *framework* TOGAF 9.2 dengan program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana perancangan *IT Roadmap* sebagai pedoman pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan program pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2. Melakukan perancangan *Blueprint Enterprise* Arsitektur pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menggunakan dengan *framework* TOGAF 9.2.
3. Melakukan perancangan *IT Roadmap* pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibuat berdasarkan misi ketiga yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih” pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2. Penelitian ini mengacu pada Surat Edaran Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Arsitektur SPBE. 5 (lima) domain yaitu domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, dan domain arsitektur infrastruktur (tidak termasuk

keamanan) dan untuk domain arsitektur layanan sendiri mengacu pada PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

3. Penelitian ini dilakukan dengan perancangan *Enterprise* Arsitektur menggunakan TOGAF 9.2 dengan *Phase Preliminary*, *Phase Architecture Vision*, *Phase Business Architecture*, *Phase Information Architecture*, dan *Phase Technology Architecture, Opportunities and Solution*, dan *Migration Planning*.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dipelajari dan diambil melalui data yang ada pada Dinas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan regulasi pemerintahan. Maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menganalisis kebutuhan program pencatatan sipil.
2. Membantu melakukan perancangan *Blueprint Enterprise Architecture* pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3. Membantu melakukan perancangan IT *Roadmap* pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bermanfaat untuk penulis agar menambah ilmu dan wawasan mengenai perancangan Arsitektur *Enterprise* Sistem pada program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Tengah.